

**MODEL ALTERNATIF DEMOKRASI DALAM SISTEM BUDAYA  
INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**MOH. ZAINUR RIFA'  
09370067**

**PEMBIMBING**

**SUBAIDI, S.Ag., M.Si.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Karya ilmiah ini ditulis berkenaan dengan maraknya sebuah fenomena kondisi perpolitikan di Indonesia semakin lama semakin menuju sebuah titik puncak kejenuhan yang dirasakan oleh masyarakat di Negeri ini. Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bersama kini menjelma sebagai ruang kekuasaan yang hanya untuk kepentingan kelompok bahkan kepentingan pribadi semata, kesenjangan sosial kini semakin terjadi yang kaya kini semakin kaya sedangkan yang miskin tambah miskin. Pada dasarnya tujuan dari sebuah negara adalah untuk mencapai tujuan bersama atau cita-cita bersama yaitu mensejahterakan warganegaranya.

Mengingat banyaknya fenomena sosial seperti itu, sampai saat ini pun, masyarakat masih belum mampu untuk melakukan sebuah terobosan baru dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di negara Indonesia ini baik pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat pada umumnya, hal ini dikarenakan masih ada rasa *phobia* yang berlebihan dalam benak masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu yang menjadi pertanyaannya adalah model alternatif demokrasi seperti apa yang mampu dan sesuai dengan sistem budaya di Indonesia.

Adapun jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sifat penelitian dekriptif-analitik dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data diperoleh dari buku-buku, kitab, jurnal, undang-undang, artikel, dokumentasi, laporan hasil penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan yang dikaji. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dengan analisis deduktifeksploratif, yaitu seperti apa model alternatif demokrasi dalam sistem budaya Indonesia.

Setelah melakukan kajian terhadap data, penelitian ini menyimpulkan bahwa ada sebuah model demokrasi yang sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia yaitu demokrasi deliberatif. Model deliberatif ini menekankan pentingnya prosedur komunikasi untuk meraih legitimitas hukum di dalam sebuah proses pertukaran yang dinamis antara sistem politik dan ruang publik yang dimobilisasi secara kultural.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada,  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta,

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Zainur Rifa'  
NIM : 09370067  
Judul Skripsi : **Model Alternatif Demokrasi Dalam Sistem Budaya Indonesia**

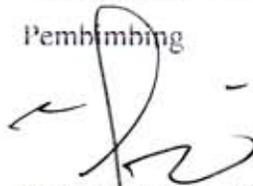
Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam studi Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat dengan segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Oktober 2013

Pembimbing



**Subaidi, S.Ag., M.Si.**

NIP. 19750517 200501 1 004



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2001/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : MODEL ALTERNATIF DEMOKRASI  
DALAM SISTEM BUDAYA INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Moh. Zainur Rifa'  
NIM : 09370067  
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Oktober 2013  
Dengan nilai : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**

Penguji I/Ketua Sidang

Subaidi, S.Ag., M.Si.

NIP.19750517 200501 1 004

Penguji II

Drs. M. Rizal Qasim, M.Si.

NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji III

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 18 Oktober 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorbardi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Zainur Rifa'

NIM : 09370067

Jurusan : Jinayah SIyasah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Oktober 2013

Yang Menyatakan

  
  
Mon. Zainur Rifa'  
NIM: 09370067

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	aposrof
ي	Ya’	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولىاء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>au</i>
	قول		Ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil furūd atau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

## **MOTTO**

“Hidup Harus Berpihak”



**PERSEMBAHAN**

Atas Karunia Allah  
Subhanahu Wata'ala  
Skripsi ini Kupersembahkan

Kepada : Almamaterku  
tercinta,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Kepada keluargaku tercinta  
:  
Ayahanda termulia Ahmad  
Sutaji, ibunda Nur  
Kholifah, adikku Siti  
Raudhotul Jannah & Luluk  
Nur Aini

Dan semua civitas para  
pecinta ilmu

Semoga karya tulis ini  
membawa manfaat bagi kita  
semua

Amin...



## KATA PENGANTAR

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang mampu memberikan suri tauladan bagi umatnya sehingga kita mampu terlepas dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur *alhamdulillah*, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jinayah Siyasah. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul MODEL ALTERNATIF DEMOKRASI DALAM SISTEM INDONESIA ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak berlalu begitu saja tanpa adanya doa kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan petunjuknya, segala puji bagi-Mu wahai dzat yang maha welas asih.
2. Ayahanda Ahmad Sutaji dan Ibunda tercinta Nur Kholifah, yang tiada henti selalu memberi motivasi Ananda untuk melangkah maju dan yang selalu mencurahkan doa, kasih sayang dan cintanya hingga tak terbatas,

yang senantiasa mengadakan sebuah ketiadaan. Mungkin sampai habis kata-kata di dunia ini, belum cukup untuk mengungkapkan segenap perasaan sayang dan terimakasih Ananda untuk Ayah dan Ibu.

3. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Noorhaidi, S.Ag, M.Phil, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bpk. Dr. H. M. Nur, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
6. Bpk. Subaidi, S.Ag.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan juga sebagai Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum, teman-teman JS angkatan 2009, teman-teman KKN Krambilsawit I, dan para Rekan-Rekanita Lingkar Mahasiswa Genggong Yogyakarta (LIMAGOYA), dan semua teman-teman yang tak mampu lembaran-lembaran ini menyebutkan satu-persatu.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa

diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangkalangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan diinginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia dan akhirat. Semoga Allah mengabulkan. Amin *Ya Rabbal 'alamin*.

Akhir kata, penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penulis harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis pribadi, Amin.

Yogyakarta, 18 Oktober 2013

Penyusun

MOH. ZAINUR RIFA'  
NIM. 09370067

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	5
D. Telaah pustaka .....	6
E. Kerangka teoritik .....	9
F. Metode penelitian .....	14
G. Sistematika pembahasan .....	17
<b>BAB II TEORI-TEORI DASAR DEMOKRASI ALTERNATIF</b> .....	<b>19</b>
A. Teori Habitus Doxa Dalam Sebuah Demokrasi Alternatif .....	19
1. Produksi Dan Reproduksi Struktur .....	20
2. Ranah Dan Habitus .....	21
3. Doxa Dan Habitus .....	23
4. Mendamaikan Yang Obyektif (ranah) dan Subyektif (habitus) .....	24
5. Modal Simbolik Dan Kekerasan Simbolik .....	26
6. Relevansi Pemikiran Bourdieu di Indonesia .....	29
B. Teori Budaya Sebagai Dasar Hukum .....	30
1. Definisi ‘Urf .....	31

2. Macam-macam ‘Urf .....	32
3. Hukum ‘Urf .....	32
<b>BAB III TINJAUAN BUDAYA DEMOKRASI DI INDONESIA .....</b>	<b>35</b>
A. Sistem Budaya Indonesia .....	35
1. Hirarki .....	36
2. Paternalistik .....	39
3. Komunalistik .....	40
B. Sistem Demokrasi Indonesia .....	43
1. Strukturalis .....	43
2. Kulturalis .....	49
3. Transisional .....	53
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>58</b>
A. Demokrasi Alternatif .....	58
1. Konsep Proseduralistis Tentang Demokrasi .....	59
2. Demokrasi Deliberatif .....	60
3. Negara Hukum Dan Legitimitas Kekuasaan .....	63
a. Kekuasaan Administratif .....	64
b. Kekuasaan Komunikatif .....	66
c. Kedaulatan Rakyat Sebagai Prosedur .....	68
4. Peran Ruang Publik Dan Masyarakat Warga .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
1. Biografi Tokoh .....	77
2. Daftar Riwayat Hidup .....	81

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 68 tahun berdirinya Republik Indonesia ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *nation building*, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah diktator ini bersifat perorangan, partai, ataupun militer.

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat di bagi dalam empat masa, yang pertama masa Republik Indonesia I (1945-1959), yang kedua masa Republik Indonesia II (1959-1965), yang ketiga masa Republik Indonesia III (1965-1998), dan yang keempat pada masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang). Dari keempat masa perkembangan demokrasi sejarah Indonesia tersebut sering kali terjadi kegagalan dalam melaksanakan asas demokrasi.<sup>1</sup>

Pada masa Republik Indonesia I (1945-1959) yang terkenal sebagai demokrasi konstitusional yaitu sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 127-128.

sesudah kemerdekaan diproklamkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang untuk selalu menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Umumnya kabinet dalam masa pra pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik oleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan untuk melaksanakan programnya. Begitu juga pemilihan umum tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, bahkan tidak dapat menghindarkan perpecahan yang paling gawat antara pemerintah pusat dan beberapa daerah.

Faktor-faktor semacam ini, ditambah dengan tidak adanya anggota-anggota partai-partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 129.

Pada masa Republik Indonesia II (1959-1965) yang terkenal sebagai masa Demokrasi Terpimpin, ciri-ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial-politik. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini. Selain itu banyak lagi tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, dan masih banyak lagi yang lainnya.<sup>3</sup>

Pada masa Republik Indonesia III (1965-1998) ini Golongan Karya, dimana ABRI memainkan peranan penting diberi landasan konstitusional yang lebih formal. Perkembangan lebih lanjut pada masa ini (yang juga disebut sebagai Orde Baru yang menggantikan Orde Lama) menunjukkan peranan presiden yang semakin besar. Secara lambat laun tercipta pemusatan kekuasaan di tangan presiden karena presiden Soeharto telah menjelma sebagai seorang tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia, tidak saja karena jabatannya sebagai presiden dalam sistem presidensial, tetapi juga karena

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 130.

pengaruhnya yang dominan dalam elit politik Indonesia. Keberhasilan memimpin penumpasan G 30 S/PKI dan kemudian membubarkan PKI dengan menggunakan surat perintah 11 Maret (Super Semar) memberikan peluang yang besar kepada jenderal Soeharto untuk tampil sebagai tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia.

Perlunya menjaga kestabilan politik, pembangunan nasional, dan integrasi nasional telah digunakan sebagai alat pembenaran bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan politik, termasuk yang bertentangan dengan demokrasi. Masa Orde Baru ini menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu diadakan secara teratur dan berkesinambungan sehingga selama periode tersebut berhasil diadakan enam kali pemilu, masing-masing pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun ternyata nilai-nilai demokrasi tidak diberlakukan dalam pemilu-pemilu tersebut karena tidak ada kebebasan memilih bagi para pemilih dan tidak ada kesempatan yang sama bagi ketiga organisasi peserta pemilu (OPP) untuk memenangkan pemilu. Sebelum fusi partai politik tahun 1973, semua OPP kecuali Golkar menghadapi berbagai kendala dalam menarik dukungan dari para pemilih karena adanya asas monoloyalitas.

Kemudian pada Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) yang lebih kita kenal sebagai Masa Reformasi mempunyai banyak kendala juga dalam melaksanakan demokrasi, demokrasi yang terjadi pada saat ini adalah demokratisasi negara (demokrasi liberal), banyak aset-aset negara yang menjadi pemilik pemodal dan peran negara semakin kecil, biaya pencalonan

sangat besar sehingga para calon ketika sudah menjadi seorang pemimpin cenderung koruptif karena untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.

Sehingga penerapan demokrasi di Indonesia sampai saat ini masih belum menemukan suatu form yang tepat dan bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *nation building*, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah diktator ini bersifat perorangan, partai, ataupun militer.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penyusun dapat mengambil suatu rumusan pokok masalah yaitu:

1. Demokrasi alternatif seperti apakah yang sesuai dengan budaya paternalistik dan komunalistik masyarakat Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mencari demokrasi alternatif yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan demokrasi di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Secara ilmiah, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep demokrasi alternatif yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.
- b. Secara praktis, menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan umum (sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu hukum tatanegara khususnya dalam bidang pengembangan Ilmu *Siyasah* Atau Tatanegara Islam yang penyusun tekuni.
- c. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilanjutkan penelitian-penelitian selanjutnya.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dapat memberikan konstribusi positif bagi pemahaman secara utuh. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dan juga untuk membedakan dengan penelitian-penelitian yang lainnya.

Karena itu, penyusun mencoba melihat beberapa literatur yang relevan dengan pembahasan yang penyusun telaah.

Karya dari Moh. Kusnadi yang berjudul "*Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*" menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya juga mencari apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang Dasar 1945 dan maksud itulah yang merupakan isi dan jiwa dari Undang-Undang Dasar. Menurut sejarah terjadinya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil kerja panitia yang masing-masing terpisah satu sama lain, baik mengenai anggota-anggotanya, maupun waktu serta tujuan pembentukannya. Kekuasaan yang dibagi-bagikan menurut fungsi, wewenang dan kedudukan adalah petunjuk utama dan syarat mutlak dari suatu ketatanegaraan yang demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 mencita-citakan Indonesia sebagai negara demokratis.<sup>4</sup>

Karya dari Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, yang berjudul "*Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*" menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan tentang ketatanegaraan, mulai dari dasar negara yang di dalamnya menjelaskan mulai dari polemik hubungan antara negara dan agama, sidang BPUPKI dan pengesahan oleh PPKI, kemudian perkembangan rumusan, dan di bagian kedua dijelaskan segi-segi ketatanegaraan yang meliputi arti dan lingkup tatanegara, konstitusi sebagai unsur pokok hukum tatanegara, dasar dan sistem pemerintahan di Indonesia, lembaga-lembaga negara (kedudukan, tugas, fungsi, dan hubungan tata kerja), hak-hak asasi manusia sebagai unsur

---

<sup>4</sup> Moh. Kusnardi, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Gramedia, 1978).

konstitusi, hak asasi manusia di Indonesia, dan kemudian bab yang terakhir menjelaskan tentang perubahan undang-undang dasar.<sup>5</sup>

Kemudian dalam karyanya F. Budiman Hardiman yang berjudul “*Demokrasi Deliberatif*” yaitu menawarkan sebuah model bagi praktik demokrasi dan negara hukum pasca-Suharto di dalam masyarakat kita, model yang ditawarkan di sini dikenal dengan istilah “demokrasi deliberatif”, merupakan sebuah desakan untuk membuka ruang-ruang dan kanal-kanal komunikasi politis di dalam masyarakat kita yang sedang melakukan reformasi politik dan hukum dengan memperhitungkan pluralitas orientasi etnis, religius dan politis. Model yang dibangun di atasnya sangat relevan dan aktual bagi masyarakat-masyarakat kompleks yang terglobalisasi dewasa ini, termasuk masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

Kemudian dalam karyanya Budiarto Danujaya yang berjudul “*Demokrasi Disensus Politik Dalam Paradoks*”, yang menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia dimengerti sebagai deliberasi kolektif (musyawarah) untuk mencapai konsensus (mufakat). Kritik buku ini ialah bahwa demokrasi mufakat bulat semacam itu sedikit banyak memuat paksaan dan keterpaksaan, atau hegemoni. Alternatif yang ditawarkan oleh buku ini ialah demokrasi yang tidak mengidentikkan diri dengan “mufakat bulat”, melainkan dengan usaha bersatu yang tetap merasa nyaman dengan “ketidakmufakatan”, meskipun dengan mengupayakan sedikit mungkin keterpaksaan dan ketidakadilan. Alternatif ini patut dijadikan penanda demokrasi pada era reformasi. Keadilan

---

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001).

<sup>6</sup> F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

adalah akar dari politik, itulah makna dari politik radikal, yaitu politik yang diuji dalam konfrontasi ideologi. Di dalam ujian itu, politik menemukan kemungkinan terbaiknya: menghadapi perbedaan, itulah daya tahan demokrasi di era “post-ism”.<sup>7</sup>

Kemudian karya MC. Iver yang berjudul “Jaring-Jaring Pemerintahan” yang menitikberatkan bahwa kini manusia sudah mendapat ikut bagian dalam atribut kedewaan, pada mulanya merupakan satu-satunya makhluk hewan yang mempunyai dewa, karena hanya manusia sendirilah yang termasuk jenisnya, dan manusia membangun alat dan patung-patung tentangnya. Dia segera menemukan cara berbicara dan memberi nama-nama, dia juga membangun rumah, menciptakan pakaian, sepatu, tempat tidur dan memperoleh makanan dari bumi. Sesudah beberapa waktu, keinginan untuk melindungi diri mendorong manusia untuk tinggal bersama dikota. Tetapi bila mereka telah berkumpul bersama, dan karena mereka belum mengetahui seni memerintah mereka saling berbuat jahat, oleh sebab itu mereka bertebaran dan saling menghancurkan satu dengan lainnya.<sup>8</sup>

### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam sejarahnya, demokrasi belum pernah menjadi topik yang begitu hangat seperti sekarang. Dalam sistem demokrasi yang sudah tua dan mapan di Eropa dan Amerika, beberapa warga negara tengah menuntut pelaksanaan demokrasi yang lebih besar, sementara yang lainnya menuntut agar

---

<sup>7</sup> Budiarto Danujaya, *Demokrasi Disensus Politik Dalam Paradoks*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

<sup>8</sup> MC. Iver, *Jaring-Jaring Pemerintahan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Aksara Baru, 1985).

kesenjangan dalam demokrasi dihapuskan. Di negara-negara yang sistem demokrasinya lebih muda, ada kepedulian akan hadirnya lembaga-lembaga yang diperlukan untuk membangun suatu demokrasi sejati, yang stabil dan efektif. Di tempat-tempat dimana demokrasi belum sungguh-sungguh berakar, partai-partai oposisi mencita-citakan demokrasi dalam berbagai bentuk. Sekalipun demikian, kita tidak bisa mengabaikan suara-suara yang menentang dari para pengkritik dan musuh-musuh demokrasi yang mulai terdengar kembali suaranya, setelah selama dua generasi mereka seolah-olah berdiam diri dan membisu.<sup>9</sup>

Para “sahabat” demokrasi pasti akan gembira menyaksikan merebaknya hal ini, sebab andaikata bukan karena fakta bahwa orang-orang semakin sering berbicara tentang demokrasi, entah mendukung atau menentangnya, maka sulit sekali mencari pemahaman bersama mengenai apa arti kata itu. Demokrasi adalah rezim bebas? Tidak diragukan lagi. Akan tetapi, apa sih kebebasan itu? Rezim kesetaraan? Mungkin. Namun demikian, sudah berapa banyak kejahatan atas nama kesetaraan? Rezim pemerintahan mayoritas? Bagaimana jika mayoritas lebih menghendaki absurditas dan tindakan yang semena-mena? Yang terpenting, apakah demokrasi itu suatu rezim politik, suatu bentuk organisasi sosial, suatu alam pikiran atau seperangkat pola perilaku? Atukah demokrasi adalah semua itu, dan masih ditambah banyak lagi?

---

<sup>9</sup> Jean Baechler, *Demokrasi Sebuah Tinjauan Analitis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001). Hlm. 13.

Jawabannya banyak, akan tetapi, jawaban-jawaban itu mungkin menjurus kesana kemari, tidak selaras dan saling bertentangan. Yang terpenting, jawaban-jawaban itu akan diselimuti berbagai macam ideologi. Masing-masing ideologi mengusulkan satu rezim politik yang baik, tetapi ideologi itu sendiri sangat banyak. Tidak ada gunanya bersikeras menandakan bahwa analisis tentang demokrasi harus objektif, karena subjeknya sendiri tidak mungkin inkonsekuensial: definisi yang baik tentang demokrasi sebagai rezim yang baik sudah tertoreh dalam hakikat subjek itu sendiri, karena berdasarkan alasan-alasan empiris yang sudah gamblang orang tidak menempatkan Khmer dan Swiss ditempat yang sama secara berdampingan, begitu juga Rusia dibawah Stalin dan Amerika di bawah Truman, ataupun sistem demokrasi kerakyatan dan sistem demokrasi model Skandinavian. Maka dari itu, kita harus membangun suatu sudut pandang yang memungkinkan bagi objektivitas maupun bagi suatu pertimbangan nilai.<sup>10</sup>

Ketika berbica soal demokrasi, tidak jarang kita tertarik untuk hanya berkisar di seputar dimensi teoritis dari sistem tersebut. Dari omongan-omongan itu, misalnya kita memang lantas tahu bahwa setidaknya ada tiga kemungkinan bentuk pelaksanaa sistem demokrasi: Demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi liberal atau konstitusional. Sudah lama kita akrabdengan nama-nama para penggagas demokrasi kuno seperti para filsuf Yunani, maupun pemikir modern seperti Thomas Jefferson, John Stuart Mill, atau barangkali Alexis de Tocqueville. Kita juga mungkin lantas kenal

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 14.

dengan mereka yang dipandang sebagai pengkritik utama demokrasi seperti Edmund Burke atau sosiolog Italia Vilfredo Pareto itu. Dalam kaitannya dengan Indonesia, kita juga sudah sejak semula tahu bahwapara perintis kemerdekaan seperti Sukarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Syahrir berusaha menerapkan gagasan demokrasi itu dalam *jabang bayi* Republik Indonesia tak lama setelah ia lahir terutama harapan mereka untuk mewujudkan sistem demokrasi konstitusional.<sup>11</sup>

Yang sering terlewatkan dari omongan-omongan soal demokrasi itu biasanya adalah bagaimana upaya perwujudan gagasan tersebut berlangsung secara nyata dalam lembaran-lembaran kongkret sejah Indonesia sejak kemerdekaannya. Kita jarang melihat, umpamanya, bagaimana gagasan demokrasi model Barat yang dibawa pilang oleh mereka yang belajar di Eropa seperti Hatta dan Syahrir sering “berbenturan” dengan pemahaman demokrasi yang dimiliki oleh mereka yang menghabiskan masa pendidikannya di Hindia Belanda seperti Sukarno, hingga kemudian muncul apa yang disebut sebagai “demokrasi terpimpin”. Kita juga tidak sering menyimak bagaimana gagasan demokrasi itu berlangsung di tengah jatuh bangunnya kabinet parlementer dan ruwetnya zaman Demokrasi Parlementer, serta kemudian ketika militer semakin terlibat dalam perpolitikan Indonesia. Acapkali kita tidak sadar bahwa praktek-praktek anti demokrasi, pembungkaman terhadap berbagai bentuk gerakan sosial yang berlangsung di zaman orde baru, sangat mirip dengan apa yang sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada

---

<sup>11</sup> Baskara T. Wardaya, SJ, *Menuju Demokrasi Politik Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 1.

“Zaman Normal”, zaman sejak akhir 1920-an sampai zaman Jepang dimana para pejuang kemerdekaan di kebiri atau dibuang ke Boven Digul.<sup>12</sup>

Lebih dari 50 tahun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, perwujudan kenegaraan demokratis tetap merupakan agenda yang masih di depan kita. Keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam bidang pembangunan ekonomi, perwujudan administrasi kenegaraan dan politik luar negeri tidak dibarengi dengan keberhasilan dalam pembangunan demokratis. Ciri khas suasana politik dalam pemerintahan Orde Baru adalah pendekatan *Top Down*. Kebijakan massa mengambang, penataan kembali kehidupan kepartaian, domestikasi pemilihan umum, gaya pelaksanaan sidang umum MPR, lemahnya fungsi DPR, menyusutnya ciri-ciri negara hukum menjadi negara kekuasaan, kekhawatiran tak proporsional alat-alat negara terhadap pertemuan, rapat, seminar yang bernada kritis: semua itu dan banyak unsur lain telah menciptakan suasana yang segala-galanya tergantung dari koneksi dengan penguasa.<sup>13</sup>

Bukan seakan-akan defisit demokrasi sama sekali tidak disadari. Pasang surut gelombang keterbukaan dan ketertutupan membuktikan bahwa pemerintah pun samar-samar merasa bahwa belum semuanya beres dalam struktur-struktur kekuasaan politik di negara kita. Tetapi sampai sekarang pola usaha-usaha peningkatan keterbukaan sifat *on-off* dan bukan *off-on*. Seakan-akan sudah menjadi nasib bahwa setiap gelombang keterbukaan berakhir dalam ketertutupan lagi.

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 2.

<sup>13</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996), hlm. xi.

Maka tidak mengherankan kalau bahasa pemerintah sekitar demokrasi berkesan *mineur* dan defensif. Mengatakan dengan terus terang bahwa demokrasi dianggap (masih?) kurang tepat jarang ada yang berani. Daripada bicara terus terang, dipergunakan istilah “Demokrasi Pancasila” yang merupakan demokrasi yang lain dari semua demokrasi yang ada dan dengan demikian merupakan sarana cukup andal untuk menangkis segala tuntutan demokratisasi lebih nyata dari bawah (apakah saya keliru kalau mendapat kesan bahwa akhir-akhir ini istilah Demokrasi Pancasila kurang dipakai lagi? Memang, istilah itu telah menjadi bulan-bulanan, dijadikan bahan lelucon dan sinisme- Demokrasi Pancasila sebagai demokrasi bukan-bukan; memakai istilah itu semakin membawa bahaya bahwa bersama dengan istilah itu Pancasila sendiri akan tidak ditanggapi secara serius lagi oleh generasi muda, sesuatu yang tentu saja fatal andaikata sampai terjadi). Masih juga demokrasi kadang-kadang disebut bisanya dalam satu deretan dengan hak-hak asasi manusia dan masalah lingkungan hidup sebagai harus dicurigai sebagai kedok kelompok-kelompok yang i'tikadnya dicurigai mengusahakan rencana-rencana gelap mereka. Pokoknya, bicara demokrasi membuat berbagai pihak dalam sistem kekuasaan di negara kita merasa tidak enak.<sup>14</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Guna menunjang dan mengarahkan penelitian ini sampai pada target secara ilmiah, maka penelitian ini menggunakan metode/operasionalisasi dan

---

<sup>14</sup> Ibid., 3.

cara kerja untuk dapat memahami obyek yang bersangkutan.<sup>15</sup> Metode tersebut meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data melalui penelusuran kepustakaan yang selanjutnya digunakan sebagai landasan teoritis yang berkaitan dengan masalah yang penyusun teliti.

Adapun sumber pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian *library research* yaitu data sekunder yang diperoleh dengan menelusuri dan mengkaji buku literatur kepustakaan seperti; undang-undang, buku, jurnal, catatan kuliah, artikel, dokumentasi, laporan hasil penelitian terdahulu, dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>16</sup>

Ciri-ciri umum data sekunder yaitu:<sup>17</sup>

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat:
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
- c. Dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>15</sup> Kuntjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 16.

<sup>16</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik.<sup>18</sup> Deskriptif-analitik artinya setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul, kemudian diklasifikasikan, digambarkan, diuraikan, dan selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam dan komprehensif sehingga diperoleh gambaran dari obyek penelitian.<sup>19</sup> Dengan demikian mempermudah penyusun untuk melakukan analisis dan memberikan kesimpulan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yang digunakan untuk mengkaji sumber-sumber yang didasarkan pada norma-norma hukum, dan teori sosial-politik yang berlaku, baik yang bersumber dari nas al-Qur'an dan hadist, pendapat para ulama' dalam kitab-kitabnya, maupun kitab undang-undang yang berlaku..

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang penyusun kumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat literer, yaitu membaca dan menelaah sumber-sumber kepustakaan, khususnya buku-buku atau kitab yang mengupas tentang salah demokrasi.

### 5. Teknik Analisis Data

Dari data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, penyusun kemudian menganalisa isinya (*content analysis*), di mana dengan *content*

---

<sup>18</sup> M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.

<sup>19</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.

*analysis* diharapkan penyusun dapat memunculkan data-data kepustakaan yang valid dan akurat tentang dimensi jawaban dari permasalahan yang ada.

Sebagai alat untuk menganalisa data, penyusun menggunakan instrumen deduktif-eksploratif,<sup>20</sup> yakni analisa terhadap data dan penafsiran-penafsiran yang bersifat umum yang mempunyai unsur kesamaan dalam masalah yang sedang dikaji, kemudian data dan penafsiran tersebut dijelaskan (eksplor) secara rinci dan dijadikan premis mayor. Sedangkan inti masalah yang penyusun angkat dalam penelitian ini dijadikan premis minor (khusus). Sehingga dengan demikian mempermudah penyusun untuk mengambil sebuah kesimpulan secara khusus.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana setiap bab masing-masing terkait satu dengan lainnya secara sistematis dalam satu rangkaian logis (*logical sequence*) yang utuh.

Bab pertama sebagai bab pendahuluan menguraikan dan menjelaskan aspek-aspek metodologis dari penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian ini, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>20</sup> M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.

Bab dua, membahas tentang teori-teori demokrasi alternatif. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Pertama, teori habitus dan Doxa. Dan kedua, tentang teori budaya sebagai dasar hukum islam ('Urf).

Bab tiga, membahas tentang tinjauan demokrasi yang ada di Indonesia. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama, berisi tentang sistem budaya Indonesia (hirarkis, paternalistik, dan komunalistik). Kedua, berisi tentang sistem demokrasi (strukturalis, kulturalis, dan tradisional), kemudian yang ketiga demokrasi alternatif.

Bab empat, analisis, yang terdiri dari pertarungan antara budaya dan sistem demokrasi.

Bab lima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang diangkat. Tidak itu juga pada bab ini dimasukkan saran dan rekomendasi yang mudah-mudahan signifikan dan menjadi kontribusi bagi semua pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian dan pembahasan terdahulu dalam karya ilmiah ini, penyusun dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Menerapkan sebuah konsep demokrasi di Indonesia sangatlah tidak mudah, karena banyak hal yang harus kita perhatikan terutama dalam hal kebudayaan masyarakat Indonesia seperti sistem budaya Hirarki, Paternalistik dan Komunalistik. Dan dalam sistem demokrasi kita ada strukturalis, kulturalis, dan transisional. Dari itu penulis menawarkan sebuah konsep yang merangkul semua nilai-nilai tersebut sehingga model demokrasi yang penulis tawarkan mampu memberikan sebuah model yang relevan terhadap budaya masyarakat Indonesia.
2. Rakyat seharusnya berdaulat. Rakyat seharusnya memerintah diri sendiri tanpa menyerahkan kekuasaannya kepada instansi lain manapun. Begitulah himbauan yang melekat di dalam ajaran klasik tentang demokrasi. Namun demokrasi pada zaman modern dewasa ini sangatlah berbeda dengan demokrasi pada polis zaman Yunani kuno ataupun demokrasi-demokrasi yang terdahulu, karena orang harus memperhitungkan fakta pluralisme di dalam masyarakat-masyarakat kompleks yang terglobalisasi dewasa ini.

3. Komunikasi sudah selalu merupakan ciri dasar kehidupan bersama manusia, maka tuntutan teori demokrasi itu tidak lain daripada sebuah radikalisasi dari struktur-struktur komunikasi yang lama sudah ada di dalam negara hukum modern, sehingga negara hukum yang faktual sedikit demi sedikit dapat mendekati asas-asas normatifnya sendiri. Struktur-struktur komunikasi yang terkandung di dalam konstitusi negara hukum demokratis dimengerti sebagai sebuah proyek yang belum selesai namun dapat diwujudkan. Akan tetapi agar keadaan-keadaan empiris masyarakat kompleks itu dapat didekatkan pada tujuan proyek itu haruslah ada sebuah model yang sesuai untuk demokrasi, sebuah model yang secara sosiologis dapat menjelaskan dinamika komunikasi politis di dalam negara hukum demokratis yang ada.
4. Model demokrasi deliberatif ini menekankan kepada pentingnya prosedur komunikasi untuk meraih legitimasi hukum di dalam sebuah proses pertukaran yang dinamis antara sistem politik dan ruang publik yang dimobilisasi secara kultural.

## **B. SARAN**

1. Semua bentuk pemerintahan apapun itu baik, tapi kebaikan itu akan musnah ketika orang yang diberi amanah (pemimpin) tidak menjalankan amanahnya dengan baik. Seorang pemimpin tanpa

adanya sebuah keberanian dalam menjalankan sebuah roda perpolitikan maka itu hanyalah sebuah wacana.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadist**

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Baru; Revisi Terjemah, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989).

### **Buku, Dokumen, Kamus dan Sumber Internet**

Budiarjdo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gtamedia, 1977).

Mahfud MD, Moh, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001).

Kusnardi, Moh, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Gramedia, 1978).

Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

Danujaya, Budiarto, *Demokrasi Disensus Politik Dalam Paradoks*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

Iver, MC, *Jaring-Jaring Pemerintahan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Aksara Baru, 1985).

Baechler, Jean, *Demokrasi Sebuah Tinjauan Analitis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001).

Wardaya, SJ, Baskara T, *Menuju Demokrasi Politik Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Hikam, Muhammad AS, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996).

- Kuntjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Robbins, Stephen P., *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Salemba, 2008).
- Mulyana, Deddy dan Rakhmat, Jalaludin, *Komunikasi antar budaya: Panduan berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).
- Usman, Sunyoto, *Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development (CIReD), 2004).
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1988).
- Agusyanto, Ruddy, *Pengelompokan sosial dan perebutan sumberdaya: Kasus arek-arek Surabaya di Jakarta*, (Jakarta: CSIS, 1994).
- Amin, Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002)
- Amir, Dja'far, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Semarang, C.V. Toha Putra, 1970).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994).
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia; Transisi menuju demokrasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999).

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Subana M. dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005).

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1985).

UUD '45 dan Amandemen Tahun 2002, (Surakarta: Sendang Ilmu, 2002), hlm. 26.

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Mahfud, MD Moh, *Fungsi dan peranan Dewan Pertimbangan Agung di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1983).



**LAMPIRAN**

## LAMPIRAN I

### BIOGRAFI TOKOH

#### **A. Dr. F. Budi Hardiman**

Lahir di Semarang 31 Juli 1962. Pada tahun 1988 menyelesaikan program sarjana strata 1 pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Sempat bergabung dalam staf redaksi penerbit Kanisius Yogyakarta, sebelum mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara mulai tahun 1992. Tahun 1994 berangkat studi filsafat ke Jerman dan pada tahun 1997 meraih gelar Magister Artium pada Hochschule fur Philosophie Munchen dengan tesis *Demokratie als Diskurs. Zu Jurgen Habermas Diskurstheorie des demokratischen Rechtsstaates* (Demokrasi sebagai Diskursus. Kontribusi untuk Teori Diskursus tentang Negara Hukum Demokratis menurut Jurgen Habermas). Tahun 2001 meraih gelar Doktor der Philosophie (Dr.Phil) dengan disertasi berjudul *Die Herrschaft der Gleichen. Masse und totalitare Herrschaft. Eine kritische Oberprufung der Texte von George Simmel, Hermann Broch, Elias Canetti und Hannah Arendt* (Penaklukan atas yang sama. Massa dan Penaklukan Totaliter. Penyelidikan Kritis atas Teks-teks Geoerg Simmel, Hermann Broch, Elias Canetti dan Hannah Arendt, diterbitkan oleh Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M., 2001). Setelah kembali ke tanah air, sejak 2001 mengajar filsafat pada program sarjana dan pasca-sarjana di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Di Universitas Pelita Harapan Jakarta, Universitas Indonesia Jakarta dan ICAS Jakarta. Karya-karya yang pernah terbit dalam bahasa Indonesia: *Kritik Ideologi* (Kanisius, 1998), *Menuju Masyarakat*

*Komunikatif* (Kanisius, 1994), *Melampaui Positivisme dan Modernitas* (Kanisius, 2003), *Heidegger dan Mistik Keseharian* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), *Filsafat Modern* (Gramedia Pustaka Utama, 2004), *Memahami Negativitas* (Penerbit Buku Kompas, 2005), dan *Filsafat Fragmentaris* (Kanisius, 2007).

## **B. Prof. Miriam Budiardjo**

Pakar politik ini pernah menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI tahun 1974-1979. Penulis buku Pengantar Ilmu Politik, yang menjadi buku wajib mahasiswa politik. Terakhir sedang mengerjakan revisi buku Dasar-dasar Ilmu Politik yang telah 20 kali lebih dicetak ulang. Ibu Mir menghabiskan sebagian besar waktunya di sebuah ruangan kerja berjendela geser yang terbuka menghadap ruang makan rumahnya di Jalan Proklamasi No 37, Jakarta Pusat. Di situlah dia selama puluhan tahun, pagi, siang, dan malam membaca dan menulis, jika tak punya acara di luar. Ibu Mir, juga ikut aktif dalam perjuangan kemerdekaan yang dekat dengan kelompok “pemuda Sjahrir” yang belakangan mendirikan Partai Sosialis Indonesia. Ia antara lain menjadi Sekretariat Delegasi Indonesia dalam Perundingan Renville (1947-1948). Sebentar dia berkarier sebagai diplomat, bertugas di New Delhi, India, dan Washington DC, Amerika Serikat (AS). Dia perempuan diplomat pertama di Indonesia. Kemudian, alumni program S-2 di Georgetown University, Washington DC, AS, itu memilih berkecimpung di dunia pendidikan dan

keilmuan. Dia sempat mengikuti program S-3 di Harvard University, Cambridge, AS, namun tak sampai diselesaikannya. Namun pada tahun 1990-an, dia dianugerahi gelar doctor honoris causa oleh almamaternya, FISIP UI. Dia penulis buku klasik Pengantar Ilmu Politik dan Dasar-dasar Ilmu Politik yang menjadi buku wajib di semua FISIP di Indonesia. Karya penting Ibu Mir lainnya adalah buku berjudul *The Provisional Parliament in Indonesia* yang diterbitkan tahun 1956. Bersama rekan-rekannya, antara lain Sujono Hadinoto, Selo Soemardjan, Sulaiman Sumardi, Ibu TO Ihromi, dan G Pringgodigdo, Ibu Mir mendirikan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS) Universitas Indonesia. Dia menjadi dekan dua periode tahun 1974-1979 menggantikan Selo Soemardjan. Dia telah menjadi guru bagi banyak pakar politik di Indonesia, di antaranya Juwono Sudarsono, Arbi Sanit, Maswadi Rauf, dan Isbodroini Suyanto. Sebagai pengamat ilmu politik, Ibu Mir sering mengoreksi kekuasaan dengan cara yang sopan namun tetap kritis. Salah satu yang bersejarah adalah ketika bersama Rektor UI Prof Dr dr Asman Boedisantoso dan rekan-rekan Rektorat UI menemui Presiden Soeharto di Jalan Cendana tanggal 16 Mei 1998. Ketika itu dalam situasi politik telah panas, menyampaikan hasil Simposium Kepedulian UI terhadap Tatanan Masa Depan Indonesia. Berhubung Ibu Mir sudah sangat senior, dialah yang membacakan hasil simposium itu di hadapan Pak Harto. Intinya, mereka menyarankan agar Pak Harto dengan sukarela lengser ing keprabon. Butir pertama yang dibacakan Ibu Mir berbunyi, “Menyambut baik kesediaan Bapak (Soeharto) untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden...”. Namun,

kalimat tambahan “mendesak agar dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya” batal dan dibacakan. Tak lama setelah itu, Ibu Mir mundur dari berbagai kegiatan politik, termasuk dari jabatan Wakil Ketua Komnas HAM yang dijabatnya sejak tahun 1994. Memilih melanjutkan pengabdian dari ruangan kerja berjendela geser yang terbuka menghadap ruang makan itu. Keberhasilan Ibu Mir dalam karirnya tak terlepas dari dorongan orang tuanya, Saleh Mangundiningrat dan Isnadikin Citrokusumo. Bersama saudara-saudaranya didorong untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Mereka pun berhasil menjadi putera-puteri bangsa yang berguna. Kakaknya, Soedjatmoko, merupakan salah seorang pemikir Indonesia modern. Adiknya, Nugroho Wisnumurti, pernah menjadi Duta Besar RI untuk PBB dan kakak perempuannya, Siti Wahyunah (Poppy), menikah dengan Sutan Sjahrir. Miriam menerima Bintang Mahaputra Utama tahun 1998 dan Doktor Kehormatan Ilmu Politik dari UI (1997) dan menerima Bintang Jasa Utama Pengabdian kepada Republik Indonesia selama Masa Perjuangan Kemerdekaan (1995).

**LAMPIRAN II**  
**CURRICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Moh. Zainur Rifa'

Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo, 22 Juni 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Ayah : Ahmad Sutaji

Nama Ibu : Nur Kholifah

Alamat Asal : Jl. Condong KM 5, Dusun Gudang, Desa  
Selogudig Wetan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo.

Alamat Yogyakarta : Perum K, Jl. Mutiara No. 86, Pengok,  
Gondokusuman, Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan

- ❖ SDN Selogudig Wetan IV (1997-2003)
- ❖ MTs Uswatun Hasanah (2003-2006)
- ❖ MA MODEL Zainul Hasan (2006-2009)
- ❖ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)